

Judul : Perkapalan Masih Butuh Sama Insentif
Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Industri Maritim Nasional Perkapalan Masih Butuh Sama Insentif

IG PRIBADI



Lamhot Sinaga

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mendukung pengembangan industri perkapalan Indonesia mengingat 70 persen wilayah kita adalah kawasan maritim. Pengembangan sektor ini seharusnya tidak hanya terpusat di pesisir, tetapi didorong merata di berbagai wilayah.

"Karena itu, kami mendorong Pemerintah membesikan insentif fiskal untuk memperkuat ekosistem industri galangan kapal nasional," ujar Lamhot dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Lamhot menunjuk Batam sebagai contoh kawasan yang mampu menguasai 44 persen kapasitas galangan kapal nasional. Keberhasilan itu bukan semata karena faktor geografis, tapi karena adanya insentif kawasan perdagangan bebas yang mendorong iklim usaha. "Kebijakan serupa perlu dipikirkan Pemerintah secara nasional agar industri perkapalan lebih kompetitif," sambungnya.

Lamhot lalu menyoroti minimnya pemanfaatan fasilitas fiskal pembangunan kapal yang seharusnya memberikan pembebasan bea masuk untuk bahan baku. Pemerintah mestinya memperluas sosialisasi

dan mempermudah akses bagi industri agar fasilitas tersebut tidak hanya bersifat normatif.

"Kita berharap industri perkapalan dapat memberi kontribusi nyata bagi daya saing nasional. Industri ini harus menjadi penopang, bukan sekadar pelengkap," jelas legislator asal dapil Sumut II itu.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menilai, kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi alutsista sudah terbukti. Contohnya, PT PAL yang awalnya mengerjakan proyek senilai Rp 2,5 triliun, kini mampu memproduksi kapal hingga mencapai nilai Rp 48 triliun. "Itu membuktikan kemampuan perusahaan yang semakin baik," ujarnya.

Dia menegaskan, potensi industri domestik sebenarnya besar, tapi kesempatan yang diberikan masih jauh dari memadai. "Ke depan diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan domestik," kata politikus PDIP itu.

Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi menambahkan, PT PAL dan PT Pindad merupakan tulang punggung pengembangan teknologi pertahanan nasional. "Kami bangga dengan kemampuan SDM Indonesia. Beberapa kapal perang hasil desain anak bangsa sudah membuktikan kemajuan teknologi kita," ujarnya.

Kata Erna, saat ini ada lebih dari 25 institusi pendidikan yang mencetak tenaga ahli perkapalan. Makanya, perlu ada kepastian keberlanjutan lapangan kerja. Selanjutnya, pengembangan, serta transfer teknologi harus diperluas agar kemampuan tidak hanya terpusat pada sedikit tenaga ahli. ■ PVB